

Implementasi Konsep Akuntansi Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Ekonomi Biru Di Indonesia

Ardila Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kamilah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi Penulis: ardilanasution03@gmail.com

Abstract. *There are 514 urban areas in the archipelagic nation of Indonesia (Ministry of Home Affairs, 2016). There are many cities in Indonesia that are able to provide a sense of comfort and security for their residents, this of course has an impact on population growth. However, the amount of waste that can be generated and stored is limited by the carrying capacity of the urban environment. Using the idea of a "green city" which consists of nine elements of road infrastructure, traffic, green open space, clean water, noise, energy, housing, clean air and buildings is one way to overcome the above problems. All these qualities need to be utilized immediately with a comprehensive systems approach and in accordance with economic, social and environmental principles in sustainable development. Blue economy approaches can be used to eliminate waste. The "blue economy" is a term that is becoming increasingly popular in today's seas and oceans. The aim of this concept is to combine sea base development opportunities with environmental management and protection. Four conceptual interpretations of the blue economy were determined through research into the dominant discourse in international economic policy documents. How the blue economy works is also examined through an "in practice" analysis of the blue economy and related actors. Next, the scope and focus of the blue economy is explored specifically on the maritime industry, which is included or excluded in various conceptualizations. This analysis reveals areas of agreement and conflict. The consensus range reflects the growing trend towards the commercialization and valuation of nature, delineating and defining maritime boundaries and enhancing the security of the world's oceans. There are several areas of conflict, particularly disputes over the legitimacy of individuals as part of the "blue economy", highly carbon-intensive industries such as oil and gas and the growing deep sea mining industry. Oceans are becoming increasingly important in terms of potential international trade opportunities through intermediaries and buyers. the behavior of the model supporting such a relationship in the ocean is acceptable from a regular and economic point of view. The relationship between land and sea is increasing in the role and importance of the "blue economy" as the term emerges in the background. . A literature review was conducted to analyze the correct definition of the blue economy. This definition is analyzed based on the minimum requirements that are important for the blue economy. This article also tries to compile various types of activities related to marine services. This is done to determine what can be considered priority areas for blue economic growth. The blue economy concept is based on national economic development. This is comprehensively useful for achieving overall national development. Environmental accounting is stated as a process of reducing negative values and creating positive values in environmental accountability.*

Keywords: *Implementation, Blue Economy, Infrastructure, Sharia Accounting*

Abstrak. Terdapat 514 wilayah perkotaan di negara kepulauan Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Banyak kota di Indonesia yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi penghuninya, hal ini tentunya berdampak pada pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, jumlah sampah yang dapat dihasilkan dan disimpan terkendala oleh daya dukung lingkungan perkotaan. Menggunakan gagasan "kota hijau" yang terdiri dari sembilan elemen infrastruktur jalan, lalu lintas, ruang terbuka hijau, air bersih, kebisingan, energi, perumahan, udara bersih, dan bangunan adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas. Seluruh kualitas tersebut perlu segera dimanfaatkan dengan menggunakan pendekatan sistem yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ekonomi biru dapat digunakan untuk menghilangkan pemborosan. "Ekonomi biru" adalah istilah yang semakin populer di lautan dan samudra saat ini. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menggabungkan peluang pengembangan pangkalan laut dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Empat konseptual Interpretasi ekonomi biru ditentukan oleh penelitian wacana dominan dalam dokumen kebijakan ekonomi internasional. Cara kerja ekonomi biru juga diperiksa, melalui analisis ekonomi biru "dalam praktik" dan aktor terkait. Selanjutnya, ruang lingkup dan fokus ekonomi biru dieksplorasi industri maritim tertentu, mana yang disertakan atau dikecualikan bervariasi konseptualisasi. Analisis ini mengungkap area kesepakatan dan konflik. Rentang konsensus mencerminkan tren yang berkembang

Received: Desember 29, 2023; Accepted: Januari 22, 2023; Published: Februari 29, 2024

* Ardila Nasution , ardilanasution03@gmail.com

menuju komersialisasi dan penilaian alam, menunjukkan dan menentukan batas-batas wilayah lautan dan meningkatkan keamanan lautan dunia. Ada daerah konflik terutama ketidaksepakatan tentang legitimasi individu sebagai bagian dari "ekonomi biru", yang sangat intensif karbon industri seperti minyak dan gas serta industri pertambangan laut dalam yang terus berkembang. Lautan menjadi semakin penting dalam hal peluang potensial perdagangan internasional melalui perantara dan pembeli. perilaku model yang mendukung koneksi semacam itu di lautan diterima dari sudut pandang reguler dan ekonomi hubungan antara darat dan laut berkembang dalam peran dan pentingnya "Ekonomi biru" sebagai istilah menemukan asalnya di latar belakangnya. Tinjauan literatur dilakukan untuk menganalisis definisi ekonomi biru yang benar. Ini definisi dianalisis berdasarkan persyaratan minimum penting untuk ekonomi biru. Artikel ini juga mencoba struktur berbagai jenis kegiatan yang terkait dengannya jasa kelautan Ini dilakukan untuk menentukan apa yang bisa dilakukan dianggap sebagai area prioritas untuk pertumbuhan ekonomi biru. Konsep ekonomi biru didasarkan pada perkembangan perekonomian nasional, Secara komprehensif berguna untuk mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh. Akuntansi lingkungan dinyatakan sebagai suatu proses pengurangan nilai negatif dan penciptaan nilai positif pada akuntabilitas lingkungan.

Kata Kunci : Implementasi , Ekonomi Biru , Infrastruktur , Akuntansi Syariah

PENDAHULUAN

Konsep ekonomi biru merupakan pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pembangunan yang terlalu banyak menghabiskan sumber daya alam dan lingkungan. Model pembangunan yang menerapkan konsep ini adalah praktik ekonomi jangka panjang yang mengedepankan ekonomi rendah karbon (Nurhayati, 2013). Menghubungkan pembangunan darat dan laut; pembangunan yang bersih, komprehensif, dan berkelanjutan; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk melalui inovasi; dan mendorong masyarakat yang berkeadilan, merata, dan berkeadilan merupakan empat pilar yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru. (Rani dan Cahyasari, 2015).

Implementasi ekonomi biru merupakan keuntungan bagi daerah yang memiliki banyak ruang di sektor maritim. Konsep ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, Perkembangan blue economy di Indonesia dilanjutkan dengan Perpres No. 16 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2017. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus memanfaatkan posisinya di era pengembangan sumber daya yang kaya di dasar laut yang utuh. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di kawasan Asia. Secara keseluruhan, terdapat 1.860 pulau di Indonesia, menurut data yang diperbarui pada 21 November 2017, dari Statistik Finlandia. Sebaliknya, saat ini terdapat 140 pelabuhan laut di Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah. Masalah yang timbul adalah perbedaan harga barang antar pulau. Hal itu harus segera diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian deskriptif sering digunakan untuk menggambarkan fenomena alam dan buatan manusia. Fenomena tersebut dapat tercermin melalui tindakan, bentuk, hubungan, perubahan, sifat, dan perbedaan di antara kejadian-kejadian tersebut (Linarwati et al., 2016). Sebaliknya, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis dan menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk menafsirkan objek secara intuitif. (Sugiyono, 2008). Dinas Kelautan dan Perikanan Panglima Provinsi Laot Aceh dan Badan Pengawas Perikanan dan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Lampulo turut serta dalam penelitian ini. Informasi diambil dari observasi, dokumen dan studi literatur, komunikasi pribadi. Keakuratan data kemudian diperiksa dengan menggunakan triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Ekonomi Biru Terhadap Kesejahteraan Pembangunan Masyarakat Indonesia

Peningkatan industri pariwisata di Kawasan Indonesia dilakukan dengan mengubah model pengembangan menjadi ekowisata dan geowisata yang tidak merusak. Ekowisata merupakan bagian dari pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan sesuai dengan keinginan untuk menerapkan konsep ekonomi biru. Peningkatan perekonomian industri pariwisata memegang peranan penting dalam pengembangan wisata. Hal ini terkait dengan kontribusi subsektor wisata yang berkembang pesat dibandingkan subsektor lainnya (Tegar dan Saut Gurning, 2018). Penyelenggaraan wisata yang dikembangkan oleh Kementerian Perlindungan Laut dan Perikanan (DKP) dilakukan dengan menetapkan kawasan perlindungan laut.

Keberadaan kawasan lindung menawarkan multiplier effect dalam budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebelum terbentuknya cagar laut, masyarakat pesisir biasanya bekerja sebagai nelayan tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan ketergantungan mereka yang tinggi terhadap sumber daya alam. Pembentukan cagar laut menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Alokasi wisata merupakan sektor penting untuk meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia. Pengembangan kawasan wisata di kawasan lindung diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan menjaga lingkungan (Ely et al., 2019).

Pengembangan ekonomi biru tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan wisata dan pantai. Kegiatan penangkapan ikan juga menitikberatkan pada upaya mencapai ekonomi

kelautan yang berkelanjutan. Penangkapan ikan dilakukan bersama-sama dengan otoritas penangkapan ikan lainnya. Pangkalan Penguasaan Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Lampulo memiliki peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penangkapan ikan berlebihan dicegah dengan memantau alat tangkap non-lingkungan. Peran PSDKP Lampulo sangat penting untuk mencapai kelestarian stok ikan untuk kepentingan generasi mendatang. Pengendalian dan pencegahan yang dilakukan oleh PSDKP Lampulo merupakan implementasi izin penangkapan ikan 17 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2002. Qanun mengacu pada pengelolaan perikanan yang sebaik-baiknya berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian stok ikan dan lingkungannya (Maulida et al., 2017).

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian SDA yaitu seperti masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kearifan lokal dalam industri perikanan dengan adanya Panglima Laot. Panglima Laot, sebagai kearifan lokal dari masa Sultan Iskandar Muda, memiliki posisi strategis dalam penangkapan ikan masyarakat Aceh. Kekuasaan Panglima Laot berkaitan dengan penetapan peraturan atau ketentuan, antara lain tentang peredaran hasil perikanan, perintah untuk tidak melaut, penyelesaian sengketa adat atau perselisihan antar nelayan, dan hukum adat laut, koordinasi sumber daya perikanan dan promosi perjalanan laut. kebijakan kelautan dan perikanan (Raihan dan Ahmad, 2017).

Tujuan kehadiran Panglima Laot adalah untuk mencapai kekayaan melalui hukum adat laut (Sulaiman, 2011) Hukum Laos yang dibentuk oleh Panglima Laot melarang hari penangkapan ikan, yang secara tidak langsung merupakan pengisian stok ikan. Jumat, yang merupakan periode pantang berlayar lokal, dianggap sebagai waktu ibadah di komunitas Muslim. Peraturan ini membantu mencegah penangkapan berlebih dengan melarang nelayan melaut. Meskipun konsep ekonomi biru baru mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir, praktik atau implementasinya telah ada jauh sebelum konsep tersebut diterapkan. Panglima Laot juga membuat peraturan tentang penangkapan ikan yang diperbolehkan oleh nelayan. Larangan pukot, bom ikan dan potash dilarang karena mengancam ekosistem laut.

Sinergi antar pemangku kepentingan secara tidak langsung berkaitan dengan sinergi yang bertujuan untuk memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat daerahnya. Idealnya, pengelolaan dan konservasi perikanan merupakan upaya mengatasi kemiskinan sekaligus menjaga ekosistem laut. Kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan akan tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah Aceh dan daerah/kota sesuai dengan Pasal 162(2)(e) UU Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006.

B. Ekonomi Biru dan Implementasi Ekonomi Biru

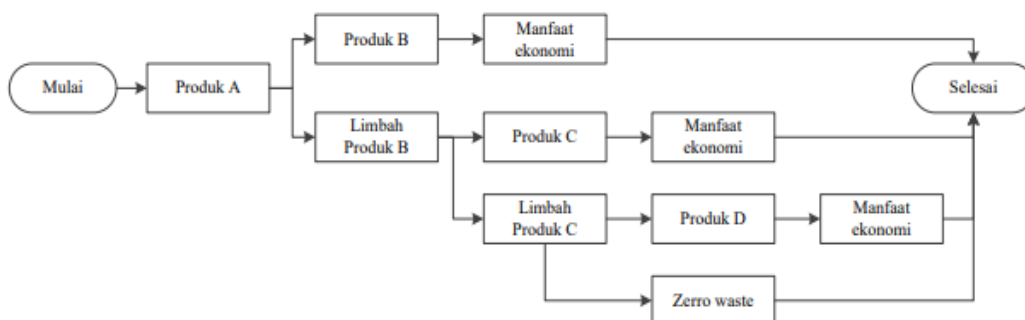
Fakta yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas mengarah pada realisasi bahwa ekonomi hijau tidak bisa memberikan efek penting seperti itu dalam pengelolaan lingkungan, Jadi diperlukan pendekatan lain diyakini dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu pendekatan alternatif yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada sumber daya alam, seperti gagasan di balik “ekonomi biru”, yang melestarikan dan menghasilkan pemanfaatan berbagai sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya sumber daya kelautan.

Gunter adalah tokoh protagonis dan orang yang memulai ekonomi biru. Dimotivasi oleh Paul (2010) dalam deep ecology, hasil dari ide Arne Ness (1970). Wawasan Paulus Manusia harus selalu hidup di tepi samudra biru yang menakjubkan, di bawah langit biru, dan dalam kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup. Meskipun aspek ekonomi biru masih diperdebatkan di banyak negara, pemilik perusahaan perlu menyadari hal-hal berikut:

1. Landasan pengelolaannya adalah gagasan efisiensi alam, yang menyatakan bahwa semua sumber daya alam dihasilkan melalui proses “zero waste”, artinya tidak ada yang terbuang dan sampah dari satu proses digunakan sebagai bahan mentah di proses lain.
2. kesadaran sosial, dimana uang meningkat sebanding dengan jumlah barang yang diproduksi, lapangan kerja yang diciptakan, dan prospek komersial bagi masyarakat.
3. Inovasi dan kreativitas, yaitu memunculkan usaha-usaha kreatif dan inventif yang meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja, dan tidak merusak lingkungan.

Selain itu, kekhawatiran mengenai efisiensi juga menjadi perhatian. Konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya didekati dari empat perspektif utama dalam ekonomi biru. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus (2010):

- (a) Zero waste (zero waste), konsep ini menggambarkan proses produksi yang bersifat siklus dan menghasilkan keluaran yang bersih. Terdapat pemborosan atau sisa dari ekstraksi sumber daya produksi pada setiap proses produksi. Sampah dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku atau energi untuk pembuatan. berdasarkan nilai sosial ekonominya. Angka. Strategi Bebas Sampah untuk Ekonomi Biru



- (b) Inklusi, yang dihasilkan dari pengelolaan setiap sumber daya alam, harus mampu menumbuhkan rasa keadilan melalui keadilan sosial dan menawarkan prospek pekerjaan yang layak dan berjangka panjang bagi para penganggur.
- (c) Pembaharuan adaptasi, dengan mempertimbangkan hukum alam dan konsep fisika adaptif.
- (d) Efek pengganda (multiplier effect), yang mengubah keekonomian semua bahan baku pertambangan alami

Makna ganda bahwa perekonomian dapat memajukan kegiatan ekonomi rantai dan pengaruh yang luas. Dampak ekonomi tidak rentan terhadap perubahan harga pasar, menjadikannya pasar yang lebih aman untuk probabilitas. Jangan hanya mengandalkan satu produk saja karena ekonomi biru lebih fokus pada produk.

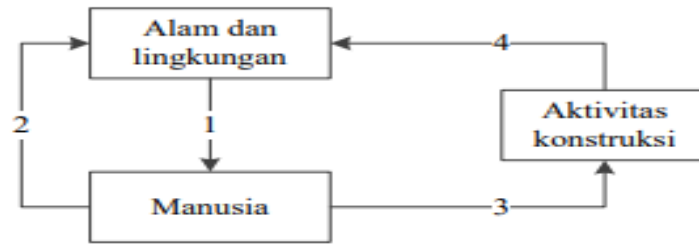
Dalam implementasi program di daerah, agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu pula jika ingin membangun ekonomi biru di suatu negara atau wilayah tertentu. Istilah-istilah yang sering digunakan antara lain:



Gambar. Tahapan Implementasi Ekonomi Biru

C. Implementasi Prinsip Ekonomi Biru Dalam Sektor Konstruksi (Infrastruktur)

Ide ekonomi biru, yang menekankan zero waste, dan ide lean manufacturing serta lean building dalam industri konstruksi memiliki banyak kesamaan. sesuai dengan filosofi minimalisasi limbah. Sekalipun sampah tercipta pada saat konstruksi, namun perlu diubah menjadi produk yang bernilai bagi pihak lain secara finansial. Begitu seterusnya hingga proses reduksi akhir menghasilkan zero waste, atau sama sekali tidak ada limbah. Ide di balik “ekonomi biru” adalah menganggap alam sebagai makhluk hidup, sehingga tatanannya harus dijaga dalam jangka waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, tidak ada langkah dalam proses pembangunan yang dapat mengganggu rantai ekosistem, yaitu suatu sistem di mana manusia dan manusia hidup.



Gambar. Cara Pandang Ekonomi Biru Terhadap Proses Konstruksi

Melalui proyek strategis nasional senilai ± 4 triliun rupiah, pemerintah Indonesia kini menjalankan program infrastruktur di seluruh negeri. Tersedianya aksesibilitas bagi semua merupakan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Diskon berbagai produk di berbagai wilayah Indonesia tersedia di wilayah Indonesia. Terdapat bukti bahwa harga komoditas pada dasarnya sama di beberapa lokasi di Indonesia. Tentu saja, ada dampak positif yang juga harus dipertimbangkan, salah satunya adalah dampak pembangunan lingkungan. Hal ini perlu ditangani agar pembangunan mempunyai dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan. Seperti terlihat pada gambar berikut, operasi konstruksi.

D. Konsep Ekonomi Biru Dalam Akuntansi Syariah

Letak Indonesia yang merupakan negara kepulauan (Nusantara) dengan kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang melimpah, memberikan peluang besar bagi negara untuk berkembang apabila sumber daya yang dimiliki dikelola dan dikembangkan secara khusus pada sektor ekonomi biru. Hal ini memerlukan pemikiran kreatif dan inovatif untuk melestarikan sumber daya laut karena dapat menunjang pasokan pangan masyarakat dan menjadi ketergantungan banyak pihak yang bekerja di industri pariwisata dan kelautan, termasuk biro perjalanan, penyedia penginapan, penjual cinderamata, dan nelayan.

Konsep ekonomi biru merupakan konsep yang menggambarkan suatu kegiatan ekonomi untuk meminimalkan limbah namun, meningkatkan perekonomian lokal dan mentransformasikan lautan menjadi ekosistem yang manfaatnya tetap terjaga dan dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, meskipun terdapat tempat wisata di dekat pantai dan di dalam perairan, namun tetap dilakukan secara berkelanjutan dan tidak meninggalkan sampah atau sampah yang dapat mengubah bentuk alami pantai. Intinya, Al-Quran mengungkapkan bahwa manusia pada awalnya diciptakan terutama sebagai khalifah di dunia, yang bertugas menjaga lingkungan dari kerusakan alam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yakni:

Artinya : “Ingatlah bahwa Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Sesungguhnya Aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi.” Mereka menjawab dengan bertanya:

“Mengapa kamu ingin menjadikan (khalifah) di bumi seseorang yang akan merusaknya dan menumpahkannya? darah, padahal kami selalu memuliakanmu dengan memuji dan menyucikanmu?” Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan untuk melestarikan dan memaksimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati di bumi, baik di darat maupun di laut. Allah juga memberikan petunjuk kepada umat manusia agar selalu sejahtera di muka bumi, baik di darat maupun di air, melalui ayat-ayat Al-Qu'an. Salah satu ayat tersebut adalah QS. Huud ayat 61 yang menyatakan:

Artinya: “Dan Kami utus saudara-saudara mereka yang shaleh kepada kaum Tsamud.” “Wahai umatku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia,” seru Saleh. Dialah yang membentuk kamu dari tanah dan menganugerahkan kepadamu kekayaan. Oleh karena itu, akuilah dosa-dosamu kepada-Nya dan mohon ampun kepada-Nya. Ya, Tuhanku mendengar (teriakkan hamba-hamba-Nya) dan sangat dekat (rahmat-Nya). (QS. Huud [11]: 61)

Ayat di atas lebih menegaskan bahwa pada dasarnya manusia di bumi perlu memperkaya bumi melalui peningkatan kegiatan ekonomi seperti pariwisata. Konsep ekonomi biru adalah agar lingkungan tetap bersih dan lestari, agar sumber daya alam terus berkembang dengan baik sehingga pemanfaatan pesisir dan laut dapat ditangani. Pemanfaatan sumber daya alam telah dijelaskan dalam Al-Quran sesuai dengan surat al-Baqoroh ayat 267, antara lain:

Artinya: Habiskanlah sebagian dari hasil amal kebaikanmu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, hai orang-orang yang beriman di jalan Allah. dan meskipun anda tidak ingin menghemat uang dengan memencetnya, jangan memilih barang yang tidak diinginkan lalu membelanjakannya dan memahami bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Layak Dipuji (QS. al-Baqoroh 226-7).

Ayat tersebut menunjukkan betapa bermanfaatnya sumber daya alam yang ada di bumi jika dimanfaatkan semaksimal mungkin. Masalah akuntansi berkelanjutan merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan di sektor komersial yang melibatkan partisipasi dalam konservasi alam. Salah satu publikasi keuangan terkemuka di dunia, Fortune Global 250, telah melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai sejak tahun 2004. Perusahaan-perusahaan tersebut dievaluasi dan laporannya akan dimuat di majalah ini dengan perhitungan pembangunan berkelanjutan dan aspek pelaporan yang ramah lingkungan. Gagasan akuntansi lingkungan yang ditonjolkan dalam fase transmisi pelaporan menuju pelaporan terintegrasi pada tahun 2020 terkait langsung dengan perspektif tanggung jawab dan kinerja organisasi melalui peran akuntansi (IIRC 2011; GRI 2013).

Hannah (2010), Kementerian Lingkungan Hidup (2002), ISO 26000, dan ISO semuanya menyatakan bahwa definisi akuntansi dan pengelolaan lingkungan yang tertimbang dalam model pelaporan keberlanjutan menentukan makna akhir dari akuntansi pembangunan berkelanjutan. Menurut definisinya, akuntansi lingkungan adalah suatu proses informasi yang menunjukkan dampak merugikan dan menghasilkan nilai positif dalam tanggung jawab lingkungan. Pengukuran digunakan sebagai sistem akuntansi dalam akuntansi kemiskinan, yang merupakan hasil dari berbagai proses akuntansi lingkungan. Ini menyampaikan proses "tambahan" organisasi yang berkaitan dengan efisiensi ekonomi (keuangan) dalam pengelolaan dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan (alam, sosial).

KESIMPULAN

Implementasi ekonomi biru di Indonesia, khususnya dalam sektor pariwisata, perikanan, konstruksi, dan akuntansi syariah, membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Transformasi model pengembangan pariwisata menjadi ekowisata dan geowisata, pembentukan cagar laut, serta pengawasan yang ketat terhadap penangkapan ikan merupakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan ekonomi biru. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan limbah dan meningkatkan efisiensi alam di sektor konstruksi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip ekonomi biru. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi biru dalam infrastruktur penting untuk mengimbangi manfaat aksesibilitas dengan dampak lingkungan yang minimal. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal, seperti peran Panglima Laot, menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks akuntansi syariah, konsep ekonomi biru juga dapat diterapkan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pentingnya pelaporan keberlanjutan dan akuntansi lingkungan dalam sektor komersial menunjukkan bahwa kesadaran terhadap dampak lingkungan telah menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, melalui sinergi antara kebijakan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan penerapan konsep ekonomi biru, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan alam.

DAFTAR REFERENSI

- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime affairs: Journal of the national maritime foundation of India*, 12(1), 58-64.
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance?. *Journal of environmental policy & planning*, 20(5), 595-616.
- Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.
- Ervianto, W. I. (2018). *Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. Prosiding Semnastek.*
- Apriliani, K. F. (2014). analisis potensi lokal di wilayah pesisir kabupaten kendal dalam upaya mewujudkan blue economy. *Jurnal EDAJ* 3.
- Dermawan, A. and Arif, M. A. (2012). Pengembangan minawisata pulau-pulau kecil untuk mendukung implementasi blue economy . *Jurnal KONAS VIII* 22-24 Oktober .
- Saad, S. (2013). pembangunan kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional (Piadato Ilmiah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)